EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN TERHADAP KLIEN PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM MEWUJUDKAN REINTEGRASI SOSIAL

Jaja Suteja

Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
IAIN Syech Nurjati Cirebon

Abstrak

Salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan sistem penegakkan hukum tersebut dilaksanakan oleh Balai Pemasayrakatan (BAPAS) yang merupakan bagian dari kegiatan sub sistem pemsayarakatan narapidana atau sub-sub system peradilan. Namun demikian keberadaan dan peran Balai Pemasayarakatan (BAPAS) tersebut sering diabaikan atau bahkan tidak diketahui oleh sub sistem yang lain dalam sistem hukum di Indonesia.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif/naturalistik dengan sumber datanya diambil dari informasi dan hasil wawancara dengan kepala BAPAS, petugas pembimbing kemasyarakatan dan klien pembebasan bersyarat di Balai Pemasayarakatan Klas I Cirebon. Sedangkan teknik pengumpulan datanya melalui kegiatan observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi.

Dari hasil wawancara bersama kepala BAPAS Klas I Cirebon, petugas pembimbing kemasyarakatan dan klien pembebasan bersyarat, menghasilkan suatu hasil penelitian bahwa pelaksanaan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan oleh BAPAS Klas I Cirebon, sudah bisa dikatakan cukup baik atau dapat berjalan secara efektif. Walaupun masih menemukan berbagai kendala antara lain ; jangkauan wilayah kerja yang terlalu luas, ketersediaan kwantitas SDM Pembimbing Kemasyarakatan yang masih kurang, minimnya anggaran, minimnya diklat teknis yang dilaksanakan, kurangnya sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan bimbingan serta masih belum optimalnya dukungan dari masyarakat.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan bimbingan terhadap klien pembebasan bersyarat dalam mewujudkan reintegrasi sosial sudah berjalan dengan efektif, baik dengan cara klien datang langsung ke BAPAS maupun petugas pembimbing kemasyarakatan yang langsung menemui ke rumah masing-masing klien (home visit).

Kata Kunci: Efektivitas, Bimbingan, Klien Pembebasan Bersyarat,
Reintegrasi Sosial

A. Pendahuluan

Perkembangan globalisasi informasi pada satu sisi melahirkan nilai-nilai positif atau nilai yang baik untuk dikembangkan kemajuannya pada berbagai sektor. Namun pada sisi

lain globalisasi informasi telah menggeser nilai-nilai suatu agama, ideologi suatu Negara bahkan mampu menggeser tradisi suatu bangsa. Dampak globalisasi membawa dampak terhadap perubahan gaya hidup, keinginan-keinginan semakin besar dan maraknya angka kejahatan dan kriminalitas di tengah-tengah masyarakat.

Sebagai salah satu masyarakat yang menjunjung tinggi tradisi dan budaya yang tinggi, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang fundamental, artinya bahwa setiap perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia senantiasa dibatasi oleh norma yang berlaku di masyarakat. Norma secara sederhana diartikan sebagai peraturan khusus dari perilaku manusia yang diakui oleh umat manusia. (Siti Irene Astuti, 1983 : 53)

Menurut Robert M. Z. Lawang di dalam bukunya Siti Irene Astuti mengartikan norma ialah sebagai patokan perilaku dalam suatu kelompok tertentu. Norma yang hidup dalam masyarakat lazim disebut sebagai norma sosial. Sedangkan norma sosial tersebut dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu *folkways* (tata cara yang lazim dikerjakan atau diikuti oleh rakyat kebanyakan, *mores* (larangan keras atau sebagai hal yang dianggap tabu) dan hukum (aturan-aturan yang bersifat normatif).

Kedudukan hukum di dalam masyarakat sangatlah penting karena pada dasarnya fungsi umum hukum menurut Sudarto, ialah mengatur kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata aturan secara khusus dalam masyarakat. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan baik di LAPAS maupun di BAPAS mempunyai tujuan akhir yaitu terciptanya kemandirian warga binaan atau narapidana pemasyarakatan untuk membangun manusia yang utuh dan mandiri (*reintegrasi sosial*). Artinya adalah bahwa setiap orang yang sudah divonis penjatuhan hukuman di pengadilan lalu kemudian telah menjalani masa tahanan di LAPAS atau Rumah Tahanan masih mempunyai hak hidup layak untuk diterima, diakui keberadaannya dan mendapatkan penghargaan atas prestasi dan karyanya ketika berada di tengah-tengah masyarakat.

Sistem hukum pidana yang ada di Indonesia dalam kerangka sistem merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan menjaga ketertiban sosial, yang dilaksanakan mulai dari tahapan kerja polisi dalam melakukan

penyidikan, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pemeriksaan perkara di pengadilan dan pelaksanaan hukuman di LAPAS dan RUTAN selanjutnya sebelum warga binaan bebas sepenuhnya dari Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan terlebih dahulu mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh petugas di Balai Pemasyarakatan. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut harus saling dukung mendukung secara sinergis hingga tujuan dari bekerjanya sistem hukum tersebut dapat tercapai dengan maksimal. (Topo Santoso. 2000 : 23)

Salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan sistem penegakkan hukum tersebut dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang merupakan bagian dari kegiatan sub sistem pemasyarakatan narapidana atau sub-sub sistem peradilan. Namun demikian keberadaan dan peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tersebut sering diabaikan atau bahkan tidak diketahui oleh sub sistem yang lain dalam sistem hukum di Indonesia. Keadaan pengabaian atau tidak diketahuinya Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tersebut tentu saja akan mempengaruhi keberhasilan kegiatan sistem penegakkan hukum secara keseluruhan. Di mana Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan bagian dari sistem hukum yang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pendampingan terhadap klien kemasyarakatan di dalam mengembangkan kehidupan dan penghidupannya baik itu pada klien anak maupun klien dewasa.

Bagi narapidana atau warga binaan yang telah menjalani 2/3 masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan atau di Rumah Tahanan kemudian dinyatakan bebas bersyarat, maka terlebih dahulu harus menjalani proses bimbingan di Balai pemasyarakatan yang meliputi bimbingan kemandirian dan bimbingan kepribadian. Tujuan pelaksanaan bimbingan ini adalah dalam rangka mewujudkan *reintegrasi sosial* yaitu suatu upaya pemulihan psikis dan mental kepada klien yang akan bebas dari lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan agar dapat diterima kembali di lingkungan masyarakatnya. (Djuretna Imam Muhdi, 1994 : 28)

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Kemasyarakatan dijelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana yang hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan pidana penjara adalah

suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan. (Bambang Poernomo, 1986 : 180)

Di dalam sistem pemasyarakatan baik di LAPAS maupun di BAPAS perlakuan petugas terhadap warga binaan pemasyarakatan di tuangkan dalam sepuluh prinsip pemasyarakatan, sedangkan yang berkaitan dengan *reintegrasi sosial* terdapat dalam lima prinsip dari sepuluh prinsip tersebut, antara lain :

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat,
3. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh ditinggalkan dari masyarakat,
4. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar bersifat pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan Negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
5. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila. ([http : //www.bapasserang.wordpress.com.](http://www.bapasserang.wordpress.com))

Pada dasarnya pemberian hukuman kepada seseorang yang bersalah bukanlah semata-mata karena balas dendam atas perbuatan yang sudah dilakukannya. Melainkan upaya introspeksi diri atas penyesalan dan perbuatan yang sudah dilaksanakannya. Oleh karena itu pemberian bimbingan dan pengayoman kepada narapidana sangat penting agar narapidana menjadi insaf, sadar dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Sehingga penjara tidak hanya sebagai tempat hukuman melainkan sebagai tempat *rehabilitasi* dan *reintegrasi sosial*. (Bambang Waluyo, 2004 : 3)

Reintegrasi sosial sangat penting untuk dilakukan dalam upaya bimbingan terhadap klien warga binaan di Balai Pemasyarakatan khususnya bagi klien bebas bersyarat. Reintegrasi sosial adalah suatu proses terhadap klien atau warga binaan pemasyarakatan

yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan kembali di tengah-tengah masyarakat, tetapi masih berada dalam bimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan dan pengawasan klien pemasyarakatan di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa tujuan bimbingan di BAPAS adalah untuk mewujudkan suatu kondisi yang dimaksud dalam tujuan sistem pemasyarakatan yaitu memulihkan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan klien pemasyarakatan sebagai individu, masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Dilihat dari peranannya Balai Pemasyarakatan adalah ujung tombak bagi warga binaan atau klien di dalam mewujudkan *reintegrasi sosial*. Karena pembimbing kemasyarakatan dituntut untuk dapat menuntun, mengantar dan mengarahkan warga binaan untuk kembali kepada lingkungan masyarakatnya secara baik dan sehat. Salah satu tugas yang dilaksanakan BAPAS adalah memberikan bimbingan kepada klien pembebasan bersyarat sebagaimana dijelaskan dalam SK Menteri Kehakiman RI No : M.01-PK.04.10 Tahun 1998. Karena BAPAS adalah salah satu unit pelaksana teknis di bidang pembinaan luar lembaga pemasyarakatan dengan tugas utamanya adalah memberikan bimbingan kemasyarakatan kepada klien untuk mewujudkan reintegrasi sosial.

Berdasarkan hasil wawancara awal bersama Imam A. Ghozali (Wawancara, 20 Mei 2016) salah seorang petugas Pembimbing kemasyarakatan BAPAS Klas I Cirebon sebagai Kepala Seksi Pembimbing Klien Anak, menjelaskan bahwa permasalahan yang sering dialami oleh para petugas pembimbing kemasyarakatan yakni masih adanya stigma negatif masyarakat kepada warga binaan yang telah bebas dari lembaga pemasyarakatan sehingga warga binaan yang sedang mengalami pembebasan bersyarat tidak bisa secara maksimal mengembangkan kehidupan dan penghidupannya di tengah-tengah masyarakat di mana ia tinggal (*reintegrasi sosial*). Padahal selama ini Balai Pemasyarakatan sudah berusaha keras membimbing klien dalam hal bimbingan kemandirian (*soft skill*) dan kepribadian yaitu pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu BAPAS juga sudah sering mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa warga

binaan yang sudah dinyatakan bebas dari Lembaga Pemasyarakatan perlu mendapatkan dukungan, perhatian dari keluarga, saudara, dan masyarakat dalam mewujudkan reintegrasi sosialnya.

Seorang mantan narapidana/warga binaan yang memperoleh cap / label negatif di tengah-tengah masyarakat dengan sendirinya akan menjadi perhatian orang-orang yang ada disekitarnya. Oleh karena itu, labelisasi penting untuk dihindari bagi seorang klien yang sedang menjalani bebas bersyarat, karena stigma negatif atau jahat dari masyarakat akan melekat terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi, bila cap/label atau stigma negatif masih melekat dan menjadi kebiasaan masyarakat untuk mencap jahat kepada mantan narapidana tidak menutup kemungkinan mantan narapidana tersebut akan merasa dikucilkan dan menjadikannya untuk mengulangi tindakan kejahatan yang lainnya.

B. Metode

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif/naturalistik. Lexy J. Moleong yang mengutip pendapat Bogdan dan Taylor (1975), mendefinisikan bahwa: Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tertentu secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan (Lexy J. Moleong, 2000:3)

Penelitian “Kualitatif” mengacu kepada pendekatan yang sifat datanya dikumpulkan, dianalisis, dan dilaporkan, bercorak kualitatif bukan kuantitatif, karena tidak menggunakan alat-alat pengukur. Disebut naturalistik, karena situasi lapangan penelitian bersifat “natural” atau “alamiah”/“wajar”, sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi, tanpa diatur dengan eksperimen atau test.

Noeng Muhadjir (1990), mengemukakan bahwa “Penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan

mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya”. (Noeng Muhadjir, 1990:49).

Selanjutnya Lexy J. Moleong (2000:3), menyimpulkan bahwa “Penelitian kualitatif berakar pada latar belakang alamiah sebagai kebutuhan mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, dan mengadakan analisis data secara induktif”. Sasaran penelitian diarahkan kepada usaha menemukan teori-teori dasar penelitian bersifat deskriptif, lebih meningkatkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data dan hasil penelitian oleh kedua pihak yakni peneliti dan subyek penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana efektifitas pelaksanaan bimbingan terhadap klien pembebasan bersyarat dalam mewujudkan reintegrasi sosial yang dilaksanakan di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas I Cirebon. Sesuai dengan sifat dan tujuan serta masalah yang diketengahkan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni metode yang ditujukan untuk memahami perilaku manusia dari sudut si pelaku sendiri. Dengan demikian pendekatan kualitatif mempunyai karakteristik tersendiri dibanding dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kualitatif umumnya lebih melihat proses dari pada produk dari objek penelitiannya. (Noeng Muhadjir 1990:49).

1. Sumber Data Penelitian

Dalam upaya memperoleh data atau informasi yang tuntas berkenaan dengan penelitian ini, sumber data yang dipilih terbagi menjadi dua yaitu: (a) data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dan dikumpulkan dari objeknya. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan responden dan informan yang ada di lapangan. Responden dalam penelitian ini adalah klien warga binaan yang ada di BAPAS Kelas I Cirebon. sedangkan informan lapangan dalam penelitian ini adalah para petugas Pembimbing kemasyarakatan BAPAS yang bertugas melaksanakan bimbingan kepada klien pembebasan bersyarat. (b) data Sekunder, yaitu data yang diperoleh bukan dari objek secara langsung melainkan melalui suatu perantara tertentu. Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan berasal

dari buku-buku, hasil penelitian, dokumen dan sumber-sumber yang relevan dengan tema penelitian ini.

2. Instrumen Penelitian

Dalam upaya menemukan fakta dan data secara alamiah dan ilmiah peneliti langsung berperan sebagai instrumen penelitian, artinya peneliti secara langsung berinteraksi dengan sumber informasi dalam suatu wawancara secara bebas dan mengamati situasi kondisi sosial serta informasi yang tersedia dalam dokumen.

Peneliti membekali diri dengan pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang dimaksud merupakan pertanyaan-pertanyaan kunci untuk membuka pemikiran masalah dalam penelitian ini. Hal ini berarti, selain pedoman wawancara masih terbuka kesempatan peneliti untuk meminta penjelasan dari berbagai pihak demi mendalami ungkapan-ungkapan masalah dan sumber informasi.

Untuk menguji keabsahan informasi yang diperoleh selama penelitian berlangsung, ada beberapa kegiatan yang peneliti lakukan, kegiatan ini meliputi :

- a) Member check, *member check* yaitu hasil laporan penelitian yang dituangkan dalam bentuk catatan lapangan diperlihatkan kepada sumber informasi untuk dibaca dan diperiksa kebenarannya, apakah sesuai dengan apa yang dikatakannya ketika peneliti mengadakan wawancara atau tidak sesuai dengan apa yang disampaikan pada saat wawancara.
- b) Triangulasi, untuk membuktikan kebenaran informasi yang diperoleh, cara yang ditempuh melalui triangulasi, maksudnya yaitu data yang diberikan oleh seorang responden diperiksa lagi kebenarannya kepada responden lainnya sampai diperoleh informasi tentang data yang diberikan oleh responden sebelumnya, agar dapat memverifikasi atau mengkonfirmasi informasi yang sudah ada. Hal ini dilakukan terhadap tiga sumber data yaitu : kepala BAPAS, Pembimbing Kemasyarakatan dan Klien Bebas Bersyarat yang sedang menjalani proses wajib lapor dan mendapatkan bimbingan di BAPAS Klas I Cirebon.
- c) Audit trail, untuk membuktikan kebenaran data yang dilaporkan dalam penelitian ini, maka setiap informasi yang diperoleh oleh peneliti akan dituangkan dalam satu

bentuk laporan catatan lapangan dengan menyebutkan keterangan dari mana informasi itu diperoleh.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dalam penelitian digunakan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

a). Observasi Partisipan

Pelaksanaan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif selalu diawali dengan observasi. Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap obyek penelitian. Adapun lokasi yang peneliti jadikan observasi dan menjadi tempat penelitian ini yaitu di Balai Pemasarakatan Klas I Cirebon.

Observasi partisipan sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain, yaitu wawancara mendalam dan questioner karena dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. (Suharsimi Arikunto, 2002 : 133)

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam observasi yaitu pertama, peneliti sebagai pemerhati, dan yang kedua, peneliti melakukan partisipasi aktif. Pada jenis observasi pertama, peneliti bertindak sebagai pemerhati dan mencatat semua peristiwa yang terjadi. Sedangkan pada observasi yang kedua peneliti turut serta dalam situasi kegiatan yang sedang berlangsung dengan cara memilih apa yang perlu diamati, berdasarkan hasil observasi dan penjelasan dari responden dan informan, kemudian dibuatlah deskripsi hasil pengamatan.

Observasi ini dilakukan peneliti dalam upaya mengumpulkan data dengan mengandalkan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Alasan peneliti menggunakan teknik ini adalah untuk memudahkan peneliti lebih memahami keadaan objek penelitian secara jelas dan komprehensif.

b). Wawancara Mendalam

Teknik wawancara (*interview*) yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari pewawancara (Suharsimi Arikunto, 2002). Teknik wawancara ini dipandang sebagai alat pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab antara peneliti dan responden untuk memperoleh sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui sampai sejauhmana efektivitas pelaksanaan bimbingan terhadap klien pembebasan bersyarat dalam mewujudkan reintegrasi sosial yang dilaksanakan di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas I Cirebon.

Menurut M. Subana, (2005) menyampaikan bahwa yang dimaksud wawancara adalah cara untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan upaya menjawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dengan arah dan tujuan yang telah ditentukan. Adapun tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui sampai sejauhmana efektivitas pelaksanaan bimbingan terhadap klien pembebasan bersyarat dalam mewujudkan reintegrasi sosial yang dilaksanakan di di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Cirebon. Adapun yang dijadikan objek wawancara ialah Kepala Bapas Kelas I Cirebon, Pembimbing Kemasyarakatan dan klien pembebasan bersyarat yang sedang menjalani wajib lapor .

c). Studi dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyimak, mencatat, dan menginventarisir catatan-catatan serta dokumen-dokumen yang bersifat administratif tentang kondisi objektif lokasi penelitian, yang peneliti dapatkan di Bapas Klas I Cirebon.

Data dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain dokumen resmi dari Bapas Klas I Cirebon. Selain data dokumen resmi, peneliti juga mencoba untuk memperoleh data dokumen pelengkap yaitu studi dokumentasi yang dilakukan sebagai pelengkap data. Dari dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat menjawab data yang diperlukan dalam penelitian ini. Karena itu melalui dokumen tersebut, diharapkan hasil penelitian ini akan menjadi lengkap dan sempurna.

4. Teknik Analisis Data

a). Analisis data di lapangan

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan dan mengelompokkan data menjadi sesuatu yang bisa dibaca dan dimengerti. Moleong (2001:103) menyatakan bahwa proses analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dalam satuan uraian data sehingga dapat ditemukan suatu tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesa kerja seperti yang disarankan dalam data.

Dengan demikian, analisis data meliputi proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan mengkategorikannya. Pengorganisasian dan pengelompokkan data tersebut bertujuan untuk menemukan data yang akhirnya dipadankan dengan teori yang sudah ada.

Dari hasil catatan lapangan, peneliti melakukan analisis pendahuluan atau *preliminary analysis* terhadap data yang sudah ada. Hasil dari analisis tersebut diasumsikan sebagai bahan perolehan data lanjutan apabila terdapat kekurangan data, sehingga bisa dilakukan perolehan data susulan.

b). Tahap analisis setelah data terkumpul

Langkah-langkah yang dilakukan setelah data terkumpul meliputi :

- 1) Kategorisasi data, merupakan bagian dari analisis data dalam penelitian. Analisis data adalah usaha yang dilakukan peneliti untuk menyusun dan menggolongkan data dalam bentuk atau pola yang disesuaikan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan tahapan kerja yang sangat penting sebab peneliti berhadapan langsung dengan data yang beraneka ragam. Jadi pada prinsipnya analisis data adalah merupakan suatu proses untuk menyusun, menggolongkan, dan mengkategorikan data guna mencari pola atau tema dengan maksud memahami makna yang ada. Data yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat berbentuk kata verbal atau kalimat yang panjang dan bahkan mungkin pendek. Namun data yang beraneka ragam itu, dalam penelitian kualitatif analisisnya sudah dimulai sejak awal dimulainya penelitian. Kemudian data tersebut segera ditulis dan dianalisis.

- 2) Reduksi data, adalah proses pemilihan, pemusat perhatian untuk menyingkat dan menyederhanakan data dalam bentuk uraian dan laporan yang rinci dan sistematis., dengan menonjolkan pokok-pokok masalah. Reduksi data merupakan suatu bentuk penajaman, penggolongan dan pembuangan data yang dianggap tidak perlu, sehingga data tersebut memberikan gambaran terarah tentang hasil pengamatan sehingga mudah bagi peneliti untuk mencari data itu kembali bila diperlukan.
- 3) Display dan klasifikasi data, adalah upaya penyajian data untuk melihat gambaran keseluruhan data atau bagian tertentu dari penelitian yang dilakukan. Informasi-informasi yang masuk dan diperoleh setelah direduksi disusun dalam suatu bentuk sehingga mudah dilihat dan dimanfaatkan peneliti. Sedangkan klasifikasi data dipergunakan untuk melihat pegelompokkan data sesuai dengan fokus penelitian.
- 4) Interpretasi dan verifikasi data, setelah melakukan langkah-langkah di atas, data yang ada diinterpretasikan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah upaya untuk mencari suatu pola, tema, hubungan, serta terhadap persamaan-persamaan yang muncul. Kesimpulan data pertama, memungkinkan masih bersifat sementara atau masih bersifat samar-samar, namun dengan bertambahnya data yang diperoleh, kesimpulan yang mantap peneliti harus senantiasa memverifikasikan data yang masuk selama penelitian berlangsung. Verifikasi ini dilakukan dengan “*member check*” maupun triangulasi. Oleh karena itu, proses verifikasi kesimpulan ini berlangsung selama dan sesudah data dikumpulkan.

C. Diskusi dan Pembahasan

Balai pemasyarakatan memegang peranan yang strategis dalam memberikan bimbingan kemasyarakatan yang dilakukan secara profesional dengan dukungan penguatan institusi dan sumber daya manusia. Sistem pemasyarakatan merupakan bagian dari proses peradilan pidana, di mana pemikiran-pemikiran mengenai pembedaan tidak lagi sekedar

penjara, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan integrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan untuk benar-benar dapat kembali hidup di tengah-tengah masyarakat. (Wawancara dengan Kepala Bapas, 20-9-2016)

Lembaga pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi atau pulihnya kesatuan hubungan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.

Perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan semakin mantap dan semakin stabil seiring dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sebab sistem ini sebagai tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan kemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yg dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, aktif berperan serta dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga masyarakat yang baik.

Ditinjau dari peran BAPAS yang sebelumnya hanya mencakup dua aspek kegiatan utama yaitu pembuatan LITMAS dan pembimbingan, maka dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 1997 dan sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 peran BAPAS semakin meningkat menjadi empat aspek kegiatan utama, yaitu; Pembuatan Litmas, Pembimbingan, Pengawasan, Memberi pertimbangan.

Balai pemasyarakatan sebagai pelaksana sistem dituntut mampu menjawab dan mengantisipasi berbagai tantangan perubahan yang terjadi di masyarakat semaksimal mungkin. Sebagaimana perannya sebagai lembaga yang menyiapkan kembalinya warga binaan pemasyarakatan di tengah-tengah masyarakat, serta memberikan pertimbangan.

Tugas kerja di dalam melaksanakan bimbingan kemasyarakatan antara lain meliputi tugas sebagai berikut: (1) menyusun rencana kerja bimbingan klien dewasa. (2) mengkoordinir penyelenggaraan registrasi terhadap klien, bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja. (3) mengkoordinir penerimaan klien pembebasan bersyarat (PB), Cuti

menjelang bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB) dan Pidana Bersyarat (PiB). (4) mengkoordinasikan penyelenggaraan Bimbingan Kemasyarakatan Klien dewasa melalui penelitian kemasyarakatan sebagai tahap awal untuk bahan usul klien pembebasan bersyarat (PB), Cuti menjelang bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB) dan Pidana Bersyarat (PiB). (5) mengkoordinir checking/data pembinaan klien pembebasan bersyarat (PB), Cuti menjelang bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB) dan Pidana Bersyarat (PiB). (6) memberikan tugas pembimbingan klien pada staf. (7) memberikan konsep-konsep bimbingan kemasyarakatan kepada atasan (Kepala Bapas). (8) memberikan arahan kepada staf. (9) mengkoordinir laporan-laporan pembinaan klien. (10) mengkoordinir laporan penerimaan dan pengakhiran klien pembebasan bersyarat (PB), Cuti menjelang bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB) dan Pidana Bersyarat (PiB). (11) memantau kegiatan TPP BAPAS. (12) mengkoordinir pembuatan laporan kegiatan harian pembimbing kemasyarakatan (PK). (13) mengatur home visit (kunjungan rumah). (14) meneliti hasil klien. (15) menugaskan staf untuk memenuhi permintaan Litmas. (16) melaksanakan penilaian DP3 / SKP Staf. (17) membuat laporan cepat tentang jumlah klien dewasa. (18) melaksanakan tugas sesuai petunjuk kepala Bapas. (Wawancara dengan PK tanggal 14-10- 2016 tentang Tugas PK di BAPAS Klas I Cirebon dan Dokumentasi BAPAS)

Dalam keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-syarat bagi pembimbing Kemasyarakatan dijelaskan bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penelitian kemasyarakatan, fungsi dari penelitian kemasyarakatan ialah untuk kepentingan hakim sebagai bahan pertimbangan memutus perkara anak agar tepat dan adil. Litmas bersifat rahasia karena berisi masalah yang sangat pribadi.
2. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan.
3. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian klien tertentu.
4. Mengkoordinasikan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sukarela yang melakukan tugas pembimbingan.

5. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi hukuman pidana, anak didik masyarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh yang diberi tugas bimbingan.

Menurut Marianti (2003) dalam bukunya *Bimbingan dan Penyuluhan Klien*, menjelaskan bahwa tugas pembimbing masyarakatan kepada klien di samping melakukan pembimbingan klien bebas bersyarat tetapi juga melakukan pembimbingan terhadap proses peradilan anak atau di bawah umur. Di antara tugas-tugas pembimbing masyarakatan antara lain: (1) menyajikan penelitian masyarakatan atau litmas untuk (a) sidang pengadilan anak sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak agar tepat dan adil. (b) penentuan terapi yang efektif yang akan diberikan kepada anak. (c) kerjasama dengan instansi lain seperti kementerian sosial, tenaga kerja dan ataupun kepolisian. (2) sebagai anggota sidang pada pengadilan Negeri dalam sidang perkara anak. (3) melakukan kunjungan rumah atau home visit dalam rangkaian: (a) pengumpulan data untuk membuat litmas, (b) pendekatan terhadap klien dalam rangka bimbingan, (c) pendekatan kepada masyarakat lingkungannya, termasuk pekerjaannya RT, RW, lurah, kawan klien, dan lain-lain, (d) terapi keluarga (family terapi) bagi keluarga yang memerlukan, (e) membimbing klien masyarakatan, (f) melakukan latihan kerja sesuai dengan struktur organisasi, (g) membina, mengawasi dan mengembangkan pembimbing masyarakatan sukarela yang disebut *volunteer probation officer*. (h) mencarikan keluarga asuh (*foster parent*), bagi anak Negara dalam lapas yang sangat memerlukan pengasuhan dari keluarga karena orang tuanya sudah meninggal, orang tua dan walinya tidak dapat ditemukan, orang tua dan wali tidak dapat meneruskan pendidikannya atau ekonominya lemah. (i) bekerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat

Selanjutnya fungsi dari pembimbing masyarakatan dalam melaksanakan program bimbingan terhadap klien bebas bersyarat adalah untuk: Menyadarkan klien untuk tidak melakukan kembali pelanggaran hukum/ tindak pidana. Menasehati klien untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang positif/baik. Menghubungi dan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga/ pihak tertentu dalam menyalurkan bakat dan minat klien sebagai tenaga kerja untuk kesejahteraan masa depan diri klien tersebut.

Secara lebih terperinci fungsi pembimbing kemasyarakatan adalah sebagai berikut: Melaksanakan pelayanan penelitian kemasyarakatan tahanan dan narapidana yang menghasilkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang digunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara anak. Melakukan registrasi klien kemasyarakatan. Melakukan pengawasan, pembimbingan, dan pendampingan bagi klien kemasyarakatan / anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan. Mengikuti sidang anak di pengadilan negeri dan sidang tim pengamat kemasyarakatan (TPP). Melaksanakan pencegahan terhadap timbul dan berkembangnya masalah yang mungkin akan terjadi kembali. Melaksanakan pengembangan kemampuan individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan taraf klien dan mendayagunakan berbagai potensi dan sumber. Memberikan dukungan terhadap profesi dan sektor lain guna peningkatan kualitas pelayanan terhadap klien kemasyarakatan. Membantu klien memperkuat motivasi, posisi klien sebagai narapidana memerlukan seseorang yang dapat membangkitkan semangat klien agar tetap memiliki motivasi kuat dalam menjalani kehidupan. Memberikan kesempatan kepada klien untuk menyalurkan perasaannya, klien sangat membutuhkan informasi dari luar yang mungkin sangat jarang didapatkan, peran pembimbing kemasyarakatan diharapkan dapat membantu ketika klien akan mengambil keputusan. Memberikan informasi kepada klien ; dalam menjalani masa pidananya klien sangat membutuhkan informasi dari luar yang mungkin sangat jarang didapatkan, peran pembimbing kemasyarakatan diharapkan dapat menjadi sumber informasi/media bagi klien. Membantu klien untuk membuat keputusan; posisi klien membutuhkan seorang yang dapat membantu ketika klien akan mengambil keputusan. Membantu klien merumuskan situasinya seorang narapidana membutuhkan seseorang yang mampu menjelaskan situasi dirinya secara utuh. Membantu klien mengorganisasikan pola perilaku serta Memfasilitasi upaya rujukan. (Tejo Harwanto, dkk, 2012 : 16-17)

1. Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Klien Pembebasan Bersyarat dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial

Tingkat efektifitas pelaksanaan bimbingan klien pembebasan bersyarat dalam mewujudkan reintegrasi sosial di BAPAS Kelas I Cirebon, sudah berjalan dengan baik

walaupun masih ada kekurangan baik dari sisi kuantitas SDM Pembimbing kemasyarakatan, jarak yang jauh untuk melaksanakan bimbingan atau *home visit* dan kurangnya sarana dan prasarana yang ada. Indikator efektifnya pelaksanaan bimbingan terhadap klien bebas bersyarat di BAPAS Klas I Cirebon adalah klien mau melaksanakan kegiatan bimbingan dengan sepenuh hati, klien dapat merasa puas dengan pelayanan PK di dalam kegiatan bimbingan yang dilaksanakan oleh BAPAS, dan Pembimbing Kemasyarakatan selalu melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Pelaksanaan bimbingan yang diberikan kepada klien adalah ketika klien dinyatakan bebas atau bebas bersyarat dari LAPAS. Tujuan kegiatan tersebut adalah agar pembimbing kemasyarakatan dapat mengontrol dan membimbing setiap individu yang keluar dari LAPAS dan memberikan bimbingan secara psikologis dan kemandirian terhadap individu tersebut. Dari segi bimbingan psikologis, biasanya seseorang akan dibimbing dan mendapatkan pelayanan konseling guna menjaga kepercayaan dirinya untuk dapat hidup di tengah-tengah masyarakat kembali secara normal seperti kehidupan sebelumnya (*reintegrasi sosial*). Karena biasanya, masih ada beberapa masyarakat yang kurang bisa menerima individu yang sebelumnya memiliki catatan hukum (mantan napi). Untuk menghindari hal tersebut, maka BAPAS membimbing dan memberikan pelayanan konseling terhadapnya yang disebut sebagai klien BAPAS. Jika sudah beberapa bulan, maka bentuk bimbingan dan konselingsnya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan klien.

Ada klien yang memang secara terbuka dan merasa senang mendapatkan bimbingan konseling ini ketika ia memiliki problem di dalam kehidupannya. Tetapi banyak pula klien yang mengikuti kegiatan ini hanya karena menggugurkan kewajibannya untuk wajib lapor kepada BAPAS. Klien seperti ini dalam melaksanakan bimbingan dan konselingsnya berdasarkan keterpaksaan bukan karena ketulusan yang didasarkan pada hatinya.

Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan bimbingan kepada klien pembebasan bersyarat BAPAS Klas I Cirebon dilaksanakan setelah warga binaan yang ada di masing-

masing LAPAS baik itu yang ada Cirebon, Kuningan, Majalengka, maupun Indramayu mengajukan kepada BAPAS untuk mendapatkan bimbingan setelah warga binaan LAPAS menjalani masa tahanan $\frac{2}{3}$ dari vonis hakim akibat dari kejahatan yang dilakukannya. Setelah itu, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) melakukan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) untuk mengidentifikasi dan mendata klien warga binaan yang ada di LAPAS mulai dari diri klien itu sendiri, keluarga klien, maupun masyarakat yang ada di sekitar klien.

Kegiatan bimbingan yang diberikan oleh Pembimbing kemasyarakatan yaitu meliputi bimbingan kepribadian dan keterampilan. Tujuan dari bimbingan kepribadian adalah dalam rangka pembentukan jati diri klien, kesehatan mental pada diri klien, mewujudkan akhlak yang baik. Sedangkan bimbingan keterampilan bertujuan agar klien dapat hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat setelah klien menjadi warga binaan di LAPAS. Walaupun seringkali klien yang datang ke BAPAS banyak yang hanya bertujuan wajib lapor disisa masa tahananannya sebagai warga binaan.

Kegiatan bimbingan kepribadian biasanya dilaksanakan melalui konseling individu atau bimbingan pribadi yang langsung ditangani oleh pembimbing kemasyarakatan. Namun sesekali BAPAS pun mengumpulkan klien untuk mendapatkan materi secara berkelompok oleh narasumber yang disiapkan oleh BAPAS baik itu dalam pembentukan kepribadiannya maupun dalam pengembangan jiwa keagamaannya. Sebagai salah satu contohnya; BAPAS pernah menghadirkan narasumber yang ahli dalam bidang ESQ untuk melatih dan membimbing klien BAPAS agar dapat mengembalikan kesadarannya sebagai makhluk Allah SWT. Sedangkan untuk bimbingan keterampilan, biasanya BAPAS bermitra dan bekerjasama dengan Dinas Sosial, LSM, BNN, BLK dan lembaga yang lainnya untuk bersama-sama memberikan pelatihan keterampilan kepada klien BAPAS baik itu dalam bidang perdagangan, menjahit, kesiapan kerja, budidaya ikan lele maupun bidang keterampilan lainnya.

Selanjutnya, klien yang mendapatkan pembebasan bersyarat ataupun cuti bersyarat tidak sepenuhnya dapat diterima oleh keluarga dan masyarakat dengan baik. Namun banyak juga keluarga dan masyarakat yang menyambut dengan baik

kedatangan mantan warga binaan (*narapidana*) untuk hidup bergaul dan bersosial di tengah-tengah masyarakat. Biasanya masyarakat yang masih belum dapat menerima mantan warga binaan untuk reintegrasi sosial di masyarakat itu karena disebabkan oleh perilakunya sebelum masuk penjara menjadi orang yang paling jahat di masyarakat seperti pada kasus pencurian, perampokan maupun pembunuhan. Selain itu, kasus pelecehan dan penistaan agama pun menjadi salah satu masalah yang cukup besar di masyarakat yang seringkali masyarakat belum dapat menerimanya dengan baik.

Ketika pembimbing kemasyarakatan mengalami kendala dalam pelaksanaan bimbingan di lapangan, biasanya PK akan melakukan mediasi dengan keluarga klien ataupun tokoh masyarakat setempat agar dapat menerima klien (mantan narapidana) untuk hidup di tengah-tengah masyarakat kembali. Kalaupun masyarakat belum dapat menerima pada saat itu, PK biasanya menyarankan agar klien BAPAS meninggalkan kediamannya untuk sementara waktu. Setelah kondisinya berubah, maka klien dapat kembali ke tempat tinggalnya yang semula.

Saat ini pelaksanaan bimbingan sudah berjalan dengan efektif sesuai dengan tupoksinya masing-masing, hanya saja setiap klien yang datang untuk melaksanakan bimbingan tidak sepenuhnya mendapatkan porsi bimbingan yang sama. Ada klien yang hanya diberikan bimbingan kepribadian *an sih*, tetapi tidak diberikan bimbingan keterampilan karena klien saat ini sudah bekerja.

2. Kendala/masalah yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Bimbingan terhadap Klien Pembebasan Bersyarat dalam mewujudkan reintegrasi sosial

Hal-hal yang menjadi kendala di dalam melaksanakan pembimbingan kemasyarakatan kepada klien pembebasan bersyarat antara lain :

a. Jangkauan Wilayah kerja yang terlalu luas. Salah satu kendala yang dialami oleh Pembimbing Kemasyarakatan baik Dewasa maupun Anak yaitu jauhnya jangkauan wilayah kerja yang dilaksanakan oleh BAPAS yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka dan Kab. Indramayu. Dengan cakupan yang sangat luas ini menyebabkan terkendala di dalam poses bimbingan baik pada diri klien sendiri maupun pada

pembimbing kemasyarakatan. Seperti seringkali klien mengeluhkan perjalanan yang cukup jauh dan membutuhkan uang yang lumayan besar ketika akan berangkat melaksanakan bimbingan dari rumah ke BAPAS. Selain itu, bagi petugas Pembimbing kemasyarakatan pun, seringkali mengeluhkan dengan jarak yang cukup jauh padahal seharusnya setiap klien BAPAS semuanya mendapatkan bimbingan home visit ke rumahnya masing-masing sebagai bentuk bimbingan dan *cross cek* apakah klien benar-benar sudah dapat diterima kembali ditengah-tengah keluarga dan masyarakatnya atau masih termarginalkan.

b. Kwantitas SDM Pembimbing Kemasyarakatan masih Kurang. Selanjutnya yang menjadi salah satu kendala di dalam pelaksanaan bimbingan kemasyarakatan bagi klien pembebasan bersyarat yaitu jumlah pembimbing kemasyarakatan yang masih sedikit. BAPAS saat ini hanya memiliki sebanyak 15 orang PK. Dengan banyaknya kasus dan masalah yang dihadapi oleh BAPAS sedangkan ketersediaan pembimbing hanya sedikit menyebabkan tidak seimbang pelayanannya bimbingan yang dilaksanakan artinya kurang maksimal dalam memberikan pelayanan. Walaupun kegiatan bimbingan yang dilaksanakan saat ini sudah berjalan lancar dan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Artinya kegiatan tersebut sudah bisa dikatakan berjalan secara efektif.

c. Anggaran minim (tahun 2016 anggaran bimbingan keterampilan dan kepribadian tidak ada). Selanjutnya yang menjadi kendala di dalam pelaksanaan bimbingan adalah minimnya anggaran yang diberikan pemerintah kepada BAPAS apalagi pada tahun 2016 saat ini anggaran untuk bimbingan keterampilan dan kepribadian tidak ada, sehingga BAPAS harus lebih ekstra di dalam membangun *networking* dengan lembaga-lembaga lainnya seperti Dinas Sosial, BNN, LSM, BLK, P2TP2A, KPAI, PKBI dan lembaga lainnya agar kegiatan bimbingan dapat dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh klien.

d. Minimnya diklat teknis tentang Bimbingan dan Konseling. Selanjutnya yang menjadi kendala di dalam pelaksanaan bimbingan adalah minimnya diklat teknis yang dilaksanakan oleh pemerintah ataupun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh pembimbing kemasyarakatan dirasa masih kurang. Selain itu ketersediaan tenaga konselor ataupun psikolog yang dapat menangani masalah psikis dan kejiwaan klien BAPAS masih belum ada. Kalaupun ada konselor yang

tersedia di BAPAS itu bukan seorang tenaga konselor profesional yang diperoleh melalui pendidikan akademik maupun diklat terkait dengan penguasaan skill kekonselingan, melainkan salah seorang manta warga binaan yang diminta oleh BNN untuk menjadi konselor di BAPAS. (Wawancara dengan Bapak Sugeng, 24-10-2016)

e. Sarana Prasarana dan dukungan anggaran kurang. Kendala selanjutnya di dalam pelaksanaan bimbingan kepada klien BAPAS adalah kurangnya sarana prasarana dan dukungan anggaran dari pemerintah khususnya yang ada di Kementerian hukum dan hak asasi manusia Prov. Jawa Barat. Sarana dan prasarana yang ada di BAPAS saat ini masih kurang, baik yang bersifat fasilitas kantor, administrasi, kendaraan dinas ataupun sarana dan prasarana yang lainnya.

f. Dukungan masyarakat (pihak ke tiga masih belum optimal). Selanjutnya yang menjadi kendala di dalam pelaksanaan bimbingan adalah masih minimnya dukungan masyarakat baik melalui kegiatan kemitraan, tidak mengetahuinya keberadaan BAPAS, maupun dukungan terhadap klien yang sudah dinyatakan bebas bersyarat dari Lembaga Kemasyarakatan (LAPAS). Seringkali masyarakat masih apriori dengan keberadaan mantan warga binaan untuk hidup kembali di tengah-tengah masyarakat. Masih ada masyarakat yang mencap negatif atau perilaku yang dilakukan klien sebelum klien masuk penjara. Walaupun realitasnya banyak juga klien yang sudah insaf dan sadar, yang saat ini telah kembali ke jalan yang benar karena mendapatkan pembinaan mental spriritual selama di LAPAS dan bimbingan kepribadian dari Balai Kemasyarakatan (BAPAS).

D. Penutup

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam pembahasan dan analisa yang telah dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan kegiatan bimbingan yang dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan terhadap klien pembebasan bersyarat BAPAS Klas I Cirebon meliputi kegiatan bimbingan kepribadian dan bimbingan keterampilan. Tujuan utama dari bimbingan kepribadian adalah agar klien dapat memiliki akhlak yang mulia dan dapat melakukan reintegrasi sosial di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan tujuan dari bimbingan keterampilan

adalah agar klien setelah menjalani masa tahanan di LAPAS dan kembali ke masyarakat memiliki bekal yang cukup terkait dengan keterampilan kerja dan kesiapan kerja.

2. Pelaksanaan bimbingan yang dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan BAPAS Klas I Cirebon, sudah bisa dikatakan cukup baik atau dapat berjalan secara efektif. Indikatornya adalah masyarakat dapat menerima petugas pembimbing kemasyarakatan dengan baik dan klien BAPAS yang mendapatkan bimbingan pun sebagian besar merasa puas atas pelayanan bimbingan yang diberikan oleh petugas pembimbing kemasyarakatan.
3. Kendala yang dihadapi pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan bimbingan terhadap klien pembebasan bersyarat dalam mewujudkan reintegrasi sosial di BAPAS Kelas I Cirebon, antara lain ; Jangkauan wilayah kerja yang terlalu luas, ketersediaan kuantitas SDM Pembimbing Kemasyarakatan yang masih kurang, minimnya anggaran, minimnya diklat teknis yang dilaksanakan, kurangnya sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan bimbingan serta masih belum optimalnya dukungan dari masyarakat.

E. Refrensi

- Andriana, 2009. *Peran BAPAS dalam Pembimbingan Klien Pemasyarakatan yang Menjalani Cuti Menjelang Bebas*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta : TP.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Arifin, HM. 1992. *Bimbingan dan Konseling*, Jakarta : Universitas Terbuka.
- Bungkaes H.R, J. H. Posumah, Burhanuddin Kiyai. 2013. *Hubungan Efektifitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*. Acta Diurna.
- Harwanto Tejo, Effendi Taufiq W, Veriadi, 2012. *Modul Tugas dan Peran Pembimbing Kemasyarakatan*, Jakarta : Direktorat Jenderal Kemasyarakatan.
- H. Hall Richard, 2006. , *Implementasi Manajemen Stratejik Kebijakan dan Proses*, terjemahan Nganam Maksensius, Yogyakarta : Amara Books.
- I. Djumhur & Moh. Surya, 1975. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Bandung : Pustaka Setia.
- Kurniawan Agung, 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Pembaruan.

- Lubis dan Martani, 1987. *Teori Organisasi*, Bandung : Ghalia Indonesia.
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan : YKPN.
- Moleong, J. Lexy. 1994. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Muhadjir Noeng, 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Pustaka Obor.
- Muhdi, Djuretna Imam, 1994. *Moral dan Religi Menurut Emile Durkheim dan Henri Bergson*, Yogyakarta : Kanisius.
- Nawawi Uha Ismail, *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja*, Jakarta : VIV Press.
- Nurihsan Juntika, 2006. *Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Pasolong Harbani, 1997. *Teori Administrasi Publik*, Bandung : Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*, Jakarta : TP.
- Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Warga Binaan*, Jakarta : TP.
- Poernomo, Bambang, 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan System Pemasyarakatan*. Yogyakarta, Liberty.
- Pramono Indra, 2011. *Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam Melaksanakan Bimbingan terhadap Klien Anak Pemasyarakatan (Studi di BAPAS Semarang)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang : Tp.
- Sanggar Panyuluh Taufik, 2013. *Peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Surakarta dalam Pembinaan terhadap Anak Yang memperoleh Sanksi Tindakan*. Penelitian Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta : Tp.
- Santoso Topo, 2000. *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung : Asy Syamil Press & Grafika.
- Salahudin Anas, 2010. *Bimbingan Konseling di Sekolah*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Siti Irene Astuti, Nur Djafiyah, S. Wisni Septriani, dan Murtamadji, 1983. *Ilmu sosial Dasar*, Yogyakarta, : Universitas Negeri Yogyakarta.
- SK Menteri Kehakiman RI No : M.01-PK.04.10 Tahun 1998, tentang *Tugas Pokok dan Fungsi BAPAS*, Jakarta : TP.
- Stone SC & Shertzer. 1976. *Fundamental of Guedance*. Boston : HMC.
- Subana, M, 2005. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung, Pustaka Setia.
- Tim BAPAS, 2015. *Modul Pembimbingan Kemasyarakatan BAPAS tahun 2015*. Jakarta, Tp.
- Tim BAPAS, 2015. *Profil dan Sejarah BAPAS Cirebon*. Cirebon : TP.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Kemasyarakatan*, Jakarta : TP.
- Usai Humaidi, 2012. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Penyelesaian Perkara Anak*. Penelitian Fakultas Hukum Universitas Mataram : Tp.
- Waluyo, Bambang 2004. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika.

- Waluyo, Bambang, 2009. *Sosiologi 3 : Menyelami Fenomena Sosial Masyarakat untuk Kelas XII SMA/MA*. Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Willis, S. Sofyan, 2009. *Konseling Individual Teori dan Praktek*, Bandung : Alfabeta.
- Wingkel, WS. 2005. *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*, Jakarta : Gramedia.
- Yandianto, 2000. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung : M2S.
- Yasin Sulkan dan Hapsoyo Sunarto, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosa Kata Baru*, Surabaya : Mekar.
- Yusuf Syamsu, 2005. *Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah/Madrasah*. Bandung : CV. Bani Quraisy.
- [http://www.bapasserang.wordpress.com./tugas kemasyarakatan](http://www.bapasserang.wordpress.com./tugas-kemasyarakatan)
- <http://himcyoo.wordpress.com/2012/06/07/konseling-eksistensial-humanistik->
- <http://adhisusilokons.wordpress.com/2011/05/27/pendekatan-konseling-berpusat-pada-konseli-person-centered/>